

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Siyasah Duturiyah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dengan mengacu pada prinsip-prinsip fasilitatif, edukasional, representasional, dan teknis. Implementasi program-program tersebut terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu, khususnya pada kelompok masyarakat sangat miskin dan kelompok disabilitas. Namun secara keseluruhan, peran Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 belum berjalan dengan baik dan perlu meningkatkan sesuai dengan rencana pemerintahan atau sesuai dengan tujuan pemerintahan, dan juga masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antar pihak terkait dan perbaikan pada aspek perencanaan serta pelaksanaan program agar tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara maksimal di Provinsi Bengkulu.

2. Bahwasanya didalam *Siyasah Dusturiyah* mengenai permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan fungsi dan kewenangan negara dalam bentuk amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. *Siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, serta menuntut pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat miskin terpenuhi sesuai prinsip keadilan sosial dan ajaran Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan koordinasi, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 dalam penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dengan memanfaatkan bantuan dari Dinas sosial secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keluar dari kemiskinan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan dan Kesehatan sebagai syarat dalam program bantuan bersyarat dan masyarakat diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Aparat Pemerintah dan Dinas social guna menyampaikan kendala dan kebutuhan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Azhary. Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995.

Daman, Rozikin. Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Dedi, Syahrial. dkk. Fiqh Siyasah. Curup : LP2 IAIN Curup. 2019.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama. 2010.

Dye, Thomas R. Memahami Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Huda, Nimatul. Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2005.

Kementrian Sosial RI. Pedoman Penanggulangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Jakarta: Kemensos RI. 2019.

Ifit Novita, Sari, et al. Metode penelitian kualitatif. Unisma Press, 2022.

Ilmar, Aminuddin. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Kencana. 2012.

Iqbal, Muhammad. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.

Midgley, James. Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Moh. Kusnardi. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar Bakti. 1987.

Muhtaj, Majda El. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.

Pulungan, Suyuti. Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Yogyakarta, Ombak: 2014.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Cetakan ke-7. 2017.

S. F. Marbun. Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: FH UII Press. 2012.

Situmorang, Jubair. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam. Bandung : Pustaka Setia Bandung. 2012.

Suggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Suharto, Edi. Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar. Bandung: Alfabeta. 2014.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Deza ,Eki, Iskandar. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gersik Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai Penanggulangan Tingginya Angka Kemiskinan (studi di kabupaten gersik). Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Fajry R, Febriyanty. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 11, No 2, Juli 2018.

Sabda Ariyan. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (studi kasus di kecamatan tanjung balai asahan). Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020.

Guruh, Muhammad. Implementasi PERPRES No. 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Panji Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 3, (2017).

Hadiguna, M. Indrawardy. Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021.

Marilang. Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

Maruli, Gomgom, Purba. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Skripsi (IAIN Sultan Syaraif Kasim Riau Pekanbaru 2022),

Nisa, Mumtazun. Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 “ Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskian” (Studi Di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2017.

Nurul, Fatimah, Analisis Peran Pemerintah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Administrasi Publik, Volume 12 Nomor 1 tahun 2022.

Taufiq, Ahmad, Peran Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Volume 8 Nomor 2 tahun 2021.

Wibisono, Siswomihardjo, Koento. Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum, Jurnal Khidmat Sosial, volume 1 Nomor 1 tahun 2023.

C. Internet

<https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-akan-koordinasikan-program-penurunan-tingkat-kemiskinan-dan-tingkat-stunting>.

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 5:00 WIB.

Widodo, Tri, W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2025 pukul 08.30.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan